

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Pembangunan Daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.¹⁰ Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut: pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja.

Dalam pelaksanaan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, perlu adanya strategi pengembangan ekonomi daerah yang baik dan terarah agar mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Keberhasilan dalam pertumbuhan ekonomi sendiri erat

¹⁰ Lincoln Arsyad, *Ekonomi Pembangunan Edisi 5*, (Yogyakarta; UPP STIM YKPN, 2016), hal. 374

kaitannya dengan strategi pembangunan ekonomi. strategi pembangunan daerah pada dasarnya merupakan cara atau jalan terbaik untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula. Karena itu strategi yang baik dan tepat akan menghasilkan pencapaian tujuan secara tepat dan terarah sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien.¹¹ Strategi pembangunan daerah dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu:¹²

a. Strategi Pengembangan Fisik atau Lokalitas

Dilakukan dengan program perbaikan kondisi fisik atau lokalitas daerah untuk kepentingan pembangunan industri dan perdagangan. Tujuannya untuk menciptakan identitas daerah atau kota, memperbaiki basis pesona atau kualitas hidup masyarakat dan memperbaiki dunia usaha daerah.

b. Strategi Pengembangan Dunia Usaha

Pengembangan dunia usaha merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya Tarik, kreasi atau daya perekonomian daerah yang sehat.

c. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting dalam proses pembangunan ekonomi.

¹¹ Sjafrizal, *Teknik Praktis Penyusunan Perencanaan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Baduose Media, 2009), hal. 61.

¹² Lincolin Arsyad,....., hal. 383.

d. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Kegiatan pembangunan masyarakat ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengembangkan suatu kelompok masyarakat di suatu daerah atau dikenal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menciptakan manfaat sosial, misalnya, melalui penciptaan proyek-proyek padat karya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan dari usahanya.

2. Konsep Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) merupakan salah satu tolak ukur utama untuk menilai perkembangan ekonomi dan pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan berkembangnya kegiatan ekonomi¹³.

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. (Schumpeter, 1999 :50) Pertumbuhan

¹³ Ina Sholati Cahyaningrum, *Pengaruh Sektor Riil dan Keuangan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2007-2014*, (Jurnal: Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, AN-NISBAH, Vol. 04, No. 01, Oktober 2017), hal. 114.

ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang¹⁴.

Menurut Prof. Simon Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan, dan ideologis yang diperlukannya.

Menurut Solow–Swan, Pertumbuhan ekonomi tergantung kepada pertambahan penyediaan faktor–faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pertumbuhan ekonomi secara paling sederhana dapat diartikan sebagai pertambahan output atau pertambahan pendapatan nasional agregat dalam kurun waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan “*output* perkapita”. Dalam pengertian ini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu output total dan jumlah penduduk, sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi perspektif waktu jangka panjang, yaitu apabila selama

¹⁴ Sadono Sukirno, *ekonomi pembangunan*, (Medan: Borta,1981), hal 13.

jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang jelas untuk menaik. (*economic growth*) Berdasarkan dua pengertian pertumbuhan ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat terjadi jika suatu negara atau suatu daerah mampu menyediakan barang ekonomi bagi penduduknya, akibat dari hasil penggunaan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam jangka panjang dan pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan pendapatan perkapita. Selain itu pertumbuhan ekonomi merupakan persentase dari selisih PDRB suatu daerah atau Negara pada periode tertentu. Dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$g = \frac{\text{PDRB}_n - \text{PDRB}_{n-1}}{\text{PDRB}_{n-1}} \times 100$$

Keterangan:

g = tingkat pertumbuhan ekonomi yang dinyatakan dalam persen.

PDRB_n = pendapatan domestik pada tahun akhir.

PDRB_{n-1} = Pendapatan domestik pada tahun berjalan.

Menurut delman (1961), mengidentifikasi adanya tiga faktor utama mendorong perubahan teori dan paradigma pembangunan ekonomi dari masa ke masa. Yang pertama,

adanya perubahan ideology, yang kedua adanya revolusi dan inovasi teknologi, dan yang ketiga adanya perubahan lingkungan internasional sebagai dampak globalisasi ekonomi yang berlangsung secara insentif, yang tercermin pada semakin terintegrasinya kegiatan ekonomi anatar bangsa.¹⁵ Teori-teori yang mencakup pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, sebagai berikut:

a. Teori Klasik

Menurut Smith (dalam Arsyad,1999) membedakan dua aspek utama dalam pertumbuhan ekonomi yaitu: Pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pada pertumbuhan output total sistem produksi suatu negara dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sumber Daya Alam yang tersedia apabila sumber daya alam belum dipergunakan secara maksimal maka jumlah penduduk dan stok modal merupakan pemegang peranan dalam pertumbuhan output.
2. Sumber Daya Insani Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan angkatan kerja yang bekerja dari masyarakat.
3. Stok Barang Modal Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal.

¹⁵ Lincolin Arsyad, Ekonomi Pembangunan, hal. 55.

b. Teori Noe – Klasik

Dikembangkan oleh *Robert Solow* dan *Trevor Swan* berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi bersumber pada penambahan faktor – faktor yang mempengaruhi penawaran agregat. Bahwa perkembangan faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor penentu dalam pertumbuhan ekonomi. Teori neoklasik juga membagi tiga jenis input yang berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:

1. Pengaruh modal dalam pertumbuhan ekonomi
2. Pengaruh teknologi dalam pertumbuhan ekonomi
3. Pengaruh angkatan kerja yang bekerja dalam pertumbuhan ekonomi.

c. Teori Interregional

Teori ini merupakan perluasan dari teori basis ekspor sehingga diasumsikan selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi bersifat eksogen dan saling terkait dengan satu sistem dari daerah lain. Teori neoklasik berpendapat faktor teknologi ditentukan secara eksogen dari model. Kekurangan dalam keberadaan teknologi ini yang menyebabkan munculnya teori baru yaitu teori pertumbuhan endogen.

d. Teori Harrod – Domar (*Keynesian*)

Harrod – Domar (dalam Sadono, 2005), menyatakan agar seluruh barang modal yang tersedia dapat digunakan sepenuhnya, permintaan agregat harus bertambah sebanyak kenaikan kapasitas barang modal yang terwujud sebagai akibat dari investasi, untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang baik maka nilai investasi dari tahun ketahun harus meningkat. Model pertumbuhan Harrod – Domar secara sederhana dapat dituliskan sebagai berikut:

1. Tabungan (S) merupakan suatu proporsi (s) dari output total (Y), maka secara persamaan:

$$S = Sy$$

2. Investasi (I) didefinisikan sebagai perubahan stok modal (K) yang diwakili oleh ΔK , sehingga persamaanya:

$$I = \Delta K$$

Karena jumlah stok modal K mempunyai hubungan langsung dengan jumlah pendapatan nasional Y seperti ditunjukkan rasio modal – output, k, maka:

$$\Delta K = k\Delta Y$$

3. Versi sederhana dari teori Harrod – Domar, yaitu:

$$\Delta Y/Y = s/k$$

e. Teori Kuznet

Menurut Kuznet bahwa pertumbuhan ekonomi suatu Negara dilihat dari kemampuan untuk menyediakan barang ekonomi kepada rakyat, hal tersebut dapat dicapai apabila ada kemajuan dibidang teknologi, kelembagaan dan penyesuaian ideologi. Teori pertumbuhan Kuznet dalam analisisnya menambahkan enam karakteristik pertumbuhan ekonomi suatu negara, yaitu:

1. Tingginya tingkat pendapatan perkapita.
2. Tingginya produktifitas tenaga kerja.
3. Tingginya faktor transformasi struktur ekonomi.
4. Tingginya faktor transformasi sosial ideologi.
5. Kemampuan perekonomian untuk melakukan perluasan pasar.
6. Adanya kesadaran, bahwa pertumbuhan ekonomi sifatnya terbatas¹⁶.

¹⁶ *Ibid*,....., hal. 56

b. Faktor-Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi

Kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam yang dimiliki, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, tersedianya usahawan yang gigih dan kemampuan mengembangkan dan menggunakan teknologi modern adalah beberapa faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Uraian di dalam bagian ini menerangkan beberapa faktor yang telah lama dipandang oleh ahli-ahli ekonomi sebagai sumber penting yang dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

1. Tanah dan kekayaan alam

Kekuatan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan lautan yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang. Apabila suatu negara mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, dan mampu mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat pada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan

memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut kemungkinan negara itu akan menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, ketrampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi.

3. Tingkat teknologi

Kemajuan ekonomi yang berlaku di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Efek yang utama adalah kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi suatu barang, menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya, dan dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harganya.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Sistem sosial dan sikap masyarakat penting peranannya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat

dapat menjadi penghambat yang serius pada pembangunan. Adat istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat. Juga di dalam sistem sosial dimana sebagian besar tanah dimiliki oleh tuan-tuan tanah, atau dimana luas tanah yang dimiliki adalah sangat kecil dan tidak ekonomis, pembangunan ekonomi tidak akan mencapai tingkat yang diharapkan. Hal ini semua bisa diatasi jika pemerintah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.¹⁷

c. Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Kekeliruan-kekeliruan premis ekonomi konvensional inilah yang menjadi sumber paradoks antara pertumbuhan dan distribusi ekonomi. Oleh karena itu dalam ekonomi syariah, paradoks ini diminimalisir dengan mengubah paradigma konflik antara pertumbuhan dengan distribusi, melalui penciptaan berbagai instrumen dan mekanisme yang bisa menjamin tumbuhnya ekonomi di satu sisi, dan terciptanya distribusi di sisi yang lain. Konsep ini terefleksikan dalam kesatuan bangunan di antara tiga faktor dalam perekonomian

¹⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal 429.

syariah, yaitu sektor riil, sektor keuangan syariah dan sektor ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf).

Jika dianalogikan, maka perekonomian itu ibarat mesin dimana mesin ini adalah sektor riilnya. Mesin ini tidak akan bekerja jika tidak didukung oleh oli mesin yang mumpuni, yaitu sektor keuangan syariah. Mesin akan bekerja tidak sempurna dan cenderung akan menjadi panas sehingga mudah rusak ketika tidak ada saluran pembuangan yang tepat, yang direfleksikan oleh sektor ZISWAF. Karena itu, keseimbangan ketiga sektor ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam membangun perekonomian. Pertumbuhan ekonomi sangat bertumpu pada sektor riil yang didukung oleh sektor keuangan syariah. Sedangkan distribusi dan pemerataan sangat bergantung pada kinerja sektor ZISWAF. Untuk itu, kinerja ketiga sektor ini harus mendapat perhatian dari pemerintah, agar *growth with equity* dapat direalisasikan.

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif islam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak sekedar terkait dengan peningkatan volume barang dan jasa, namun juga terkait dengan aspek moralitas dan kualitas akhlak serta keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi. Ukuran keberhasilan pertumbuhan ekonomi tidak semata-mata dilihat dari sisi pencapaian materi semata, namun juga ditinjau dari

sisi perbaikan kehidupan agama, sosial, dan kemasyarakatan. Jika pertumbuhan ekonomi yang terjadi justru memicu tercerabutnya nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, maka dipastikan pertumbuhan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, paling tidak ada tiga faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketiganya adalah:

1. *Investible resources* (sumber daya yang dapat diinvestasikan)

Yang dimaksud adalah segala sumber daya yang dapat digunakan untuk menggerakkan roda perekonomian. Sumber daya tersebut antara lain sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya modal.

2. Sumber daya manusia dan *entrepreneurship*

Ketika basis ekonomi syariah adalah sektor riil, maka memiliki SDM *entrepreneur* yang mampu menggerakkan sektor riil adalah keniscayaan.

3. Teknologi dan inovasi

Technological progress disadari merupakan faktor yang mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Teknologi akan melahirkan efisiensi, dan basis teknologi ini adalah inovasi. Karena itu, inovasi menjadi suatu kebutuhan yang perlu

didesain secara serius oleh pemerintah. Islam adalah ajaran agama yang memerintahkan umatnya untuk senantiasa inovatif. Dalam sebuah hadits, Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya (*al mu'min al muhtarif*)” (HR Baehaqi).

Makna *al mu'min al muhtarif* ini sangat erat kaitannya inovasi, Karena setiap karya itu pada dasarnya lahir dari sebuah inovasi dan kreativitas. Tanpa inovasi dan kreativitas, tidak mungkin akan lahir sebuah karya. Karena itu, pertumbuhan ekonomi dalam islam akan berjalan dengan baik manakala masyarakat memahami kewajibannya untuk menghasilkan karya melalui proses-proses yang kreatif dan inovatif.¹⁸

3. Sumber Pendapatan Daerah

Pada umumnya penerimaan daerah pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak dan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman

¹⁸ Irfan Syauqi Beik, dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 22.

pemerintah berasal dari luar negeri.¹⁹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah bersumber dari:

- 1) Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan
- 2) Pendapatan daerah
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dibagi menjadi:
 - Pajak Daerah
 - Retribusi Daerah
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - Lain-lain PAD yang sah
 - b. Dana Perimbangan
 - c. Lain-lain Pendapatan
- 3) Pembiayaan
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah tersebut, salah satu dari sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli

¹⁹ Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta; BPFE, 2001), hal, 22.

Daerah (PAD). Besarnya penerimaan pendapatan asli daerah akan sangat membantu bagi daerah tersebut untuk membiayai kebutuhan urusan rumah tangganya sendiri tanpa terlalu bergantung dengan bantuan keuangan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah daerah akan berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencari dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut agar juga dapat melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan yang diinginkan dan diharapkan.

4. Konsep Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya perlu diberikan sumber-sumber pendapatan atau penerimaan keuangan daerah untuk membiayai seluruh aktifitas dalam rangka pelaksanaan

tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata, komponen tersebut berasal dari Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Keempat komponen PAD tersebut juga merupakan sumber-sumber keungan daerah, oleh karena itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu komponen sumber keungan daerah. Sumber-sumber PAD merupakan bagian keungan daerah yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Menurut Halim di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.²⁰

Menurut Warsito di dalam buku karangan Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut

²⁰ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hal. 23.

sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Sedangkan menurut Herlina Rahman, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.²¹

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Sumber keuangan pada masa Rasulullah Saw pemikiran Ekonomi Islam diawali sejak nabi Muhammad Saw diutus sebagai seorang rasul (utusan Allah). Rasulullah Saw mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik dan juga masalah perniagaan atau ekonomi.

Dasar hukum dalam kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah diatur baik dalam hukum Islam maupun dan

²¹ *Ibid*, hal 24.

peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pendapatan asli daerah jika dilihat dari cermin ekonomi Islam pada masa penguasa muslim pajak diwajibkan oleh penguasa muslim karena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan Negara atau untuk mencegah kerugian yang menimpa, sedangkan perbendaharaan Negara tidak cukup dan tidak dapat menutupi biaya kebutuhan tersebut, maka dalam kondisi demikian ulama telah memfatwakan bolehnya menetapkan pajak atas orang-orang kaya dalam rangka menerapkan mashalih al-mursalah dan berdasarkan kaidah “tafwit adnaa al-mashlahatain tahshilan li a’laahuma” (sengaja tidak mengambil mashlahat yang lebih kecil dalam rangka memperoleh mashlahat yang lebih besar) dan “yatahammalu adl-dlarar al-khaas li daf’I dlararin aam” menanggung kerugian yang lebih ringan dalam rangka menolak kerugian yang lebih besar).

Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hamid al-Ghazali dalam al-Musthasfa dan asy-Syatibhi dalam al-I’tisham ketika mengemukakan bahwa jika kas Bait al-Maal kosong sedangkan kebutuhan pasukan bertambah, maka imam boleh menetapkan retribusi yang sesuai atas orang-orang kaya. Sudah diketahui bahwa berjihad dengan harta diwajibkan kepada kaum muslimin dan merupakan kewajiban yang lain

disamping kewajiban zakat. Allah ta'ala berfirman, dalam Al-Qur'an Al-Hujurat 49:15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ؕ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ
 اللَّهِ ؕ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (الحجرات: ١٥)

Artinya: orang - orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar”.²² Allah berfirman dalam Al-Qur'an At-taubah ayat: 41.

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ؕ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
 إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.²³

²² Departemen Agama RI, Al-Hikmah Al-Qur'an dan terjemahannya, (Bandung: Diponegoro, 2008), hal. 190.

²³ Rini Haryanti, *Analisis Sektor Pertanian dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2010-2017*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hal. 21.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Sumber-sumber pendapatan asli daerah menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Pemerintahan Daerah (Sonnylazio), yaitu:²⁴

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD yaitu:

- a. Hasil Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).
- b. Hasil Retribusi Daerah, Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang

²⁴ Sonny Lazio 2012, Pengertian Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah
[Http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumberpendapatan.html](http://sonnylazio.blogspot.com/2012/06/pengertian-dan-sumber-sumberpendapatan.html). diakses 12 Februari 2019

pribadi atau badan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, memberi jasa, dan memperkembangkan perekonomian daerah. Bagi daerah yang memiliki BUMD seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Bank Pembangunan Daerah (BPD), badan kredit kecamatan, pasar, tempat hiburan/rekreasi, villa, pesanggrahan, dan lain-lain keuntungannya merupakan penghasilan bagi daerah yang bersangkutan.²⁵ Hasil pengelolaan kekayaan

²⁵ Hanif Nur kholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hal 184.

daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah²⁶.

2. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik dari pedesaan, perkotaan, pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus.
3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, lain-lain PAD yang sah meliputi.
 - a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
 - b. Jasa giro
 - c. Pendapatan bunga
 - d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan

²⁶ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal 40.

- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

5. Pendapatan Pariwisata

Kontribusi pariwisata terhadap pendapatan asli daerah dapat diuraikan menjadi dua, yakni kontribusi langsung dan tidak langsung. Kontribusi langsung bersal dari pajak pendapatan yang dipungut dari para pekerja pariwisata dan pelaku bisnis pariwisata pada kawasan wisata yang diterima langsung oleh dinas pendapatan suatu destinasi. Sedangkan kontribusi tidak langsung pariwisata terhadap pendapatata asli daerah berasal dari pajak atau bea cukai barang-barang yang diimport dan pajak yang dikenakan kepada wisatawan yang berkunjung.²⁷

Menurut Yoeti, Pendapatan pariwisata adalah bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah pertahun²⁸. Berdasarkan kajian teori yang telah dikemukakan yang dimaksud dengan pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang

²⁷ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata*,..... hlm 12.

²⁸ Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm 33.

diperoleh daerah melalui kegiatan pariwisata yang dipungut melalui pajak dan retribusi. Seperti retribusi obyek rekreasi dan olah raga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan dan lainnya dengan satuan rupiah.

Menurut I Gde Pitana, pemerintah memperoleh pendapatan dari sektor pariwisata dari beberapa cara. Beberapa negara didunia, termasuk Indonesia, telah membuktikan sumbangan sektor pariwisata terhadap pendapatan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah negara manapun menaruh perhatian besar untuk berusaha menarik sebanyak-banyaknya wisatawan asing untuk berlibur ke negaranya. Sumbangan pendapatan terbesar dari pariwisata bersumber dari pajak.²⁹

1) Jumlah Kunjungan Wisata

Banyaknya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah tujuan wisata tertentu menjadi salah satu bukti bahwa daerah tersebut mempunyai daya Tarik wisata yang besar.

2) Obyek Wisata

Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu daerah tujuan wisata.

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek

²⁹ I Gde Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Cv. Andis Offset, 2009), hal 186.

wisata harus dirancang dan dibangun atau dikelola secara professional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang.

3) Tingkat hunian hotel

Peran hotel dalam industri pariwisata adalah menyediakan jasa penginapan, makan, dan minum serta jasa lainnya yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup para wisatawan. Hotel menggantikan fungsi rumah “di luar rumah” (*away home from home*) bagi para wisatawan atau pelaku perjalanan, dengan usaha memberikan rasa ama, rasa kenyamanan yang menyenangkan, kesendirian.

Menurut *Peta Aksesibilitas dan Profit Kepariwisataaan Jawa Timur* yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur, yang termasuk dalam pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh melalui:

- a. Pajak hotel, pungutan yang di bebaskan kepada tiap-tiap hotel yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.
- b. Pajak restoran, pungutan pajak yang dibebaskan kepada setiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan pajak.

- c. Pajak hiburan, pungutan yang di bebaskan kepada tiap-tiap tempat hiburan yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.
- d. Retribusi kios, pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran ijin menempati kios disuatu tempat tertentu.
- e. Retribusi kamar kecil, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas kamar kecil di obyek wisata.
- f. Retribusi iklan, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan berpromosi atas suatu produk tertentu.
- g. Karcis masuk obyek wisata, pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang masuk ke dalam suatu obyek wisata tertentu.
- h. Retribusi parkir obyek wisata, pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa penggunaan fasilitas umum untuk memarkir kendaraan.
- i. Pajak pembangunan 1, pemungutan pajak yang diberikan kepada tiap-tiap hotel dan restoran yang telah memenuhi syarat dari dinas pariwisata.

- j. Penerimaan dari dinas pariwisata setempat, penerimaan daerah yang didapat dari dinas pariwisata.

Beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah sektor pariwisata perlu dikaji pengelolaannya untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi.³⁰

6. Konsep Pariwisata

a. Pengertian pariwisata

Secara etimologis, pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu “pari” berarti ‘banyak, berkali-kali, berputar-putar’ dan “wisata” berarti ‘perjalanan’ atau ‘bepergian’. Berdasarkan arti kata ini di definisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud dan tujuan tertentu. Sementara itu, seorang ahli turisme asing terkenal bernama G.A. Schmoll menyatakan bahwa “*tourism is a highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function type organization, range of service provided and method used*

³⁰ Lia Ardiani Windriyaningrum, Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Obyek Wisata terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus Tahun 1981-2011, (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2013), hal 23.

to market and sell them. Schmoll menyatakan bahwa usaha turisme itu tergolong industri yang dibedakan atas tipe-tipe: besarnya, tempatnya yang tersebar, dan luasnya pelayanannya³¹.

Pariwisata yang berasal dari kata wisata menurut Republik Indonesia No. 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan mendefinisikan wisata sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang mengunjungi tempat tertentu dengan tujuan rekreasi, mengembangkan pribadi, atau mempelajari daya tarik wisata yang dikunjungi.³²

Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan objek dan daya Tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut³³. Jadi, bisa disimpulkan pariwisata adalah kegiatan dinamis yang melibatkan banyak manusia serta menghidupkan berbagai bidang usaha³⁴.

Sektor Pariwisata adalah sekumpulan unit produksi dalam industri berbeda yang menyediakan barang dan jasa yang khususnya dibutuhkan para pengunjung. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output dalam jangka panjang.

³¹ Bungaran A. Simanjuntak, Flores Tanjung, dkk, *Sejarah Pariwisata: Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, (Jakarta: Buku Obor, 2017), hal. 1.

³² *Ibid*, hal. 2.

³³ I Gusti Bagus Rai Utama, *Pemasaran Pariwisata*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2017), hal. 2.

³⁴ Ismayanti, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: PT Gramedia Widisarana, 2010), hal. 1

Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita yang mana teori tersebut harus mencakup pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk untuk menjelaskan output perkapita.

Jadi, adanya perkembangan pariwisata di suatu negara akan mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut karena kegiatan pariwisata akan menciptakan permintaan baik segi konsumsi maupun investasi yang pada gilirannya akan menimbulkan kegiatan produksi barang dan jasa. Selama berwisata, wisatawan akan melakukan belanja, sehingga secara langsung menimbulkan permintaan (tourism Final Demand) pasar barang dan jasa. Selanjutnya final demand wisatawan secara tidak langsung menimbulkan permintaan akan barang dan bahan baku (*Investment Devired Demand*) untuk memproduksi guna memenuhi permintaan wisatawan akan barang dan jasa tersebut. Dalam usaha memenuhi permintaan wisatawan tersebut diperlukann investasi di bidang transportasi dan komunikasi, perhotelan dan akomodasi lain, industri kerajinan dan industri produk konsumen, industri jasa, rumah makan/restoran dan lain-lain.

b. Ciri-ciri pariwisata

Melakukan perjalanan ditentukan oleh keinginan yang mendorong seseorang untuk bepergian ke daerah yang akan dituju. Melakukan perjalanan wisata adalah hal yang menyenangkan dan disukai oleh semua orang. Ada beberapa hal yang harus dilakukan, sehingga bisa disebut pariwisata, antara lain :³⁵

- 1) Harus bersifat sementara
- 2) Harus bersifat sukarela (*voluntary*) dalam arti tidak terjadi karena dipaksa.
- 3) Tidak bekerja yang sifatnya menghasilkan upah atau bayaran.

Selain itu, ada beberapa ciri-ciri wisata, antara lain :³⁶

- 1) Berupa perjalanan keliling yang kembali lagi ke tempat asal.
- 2) Pelaku perjalanan hanya tinggal untuk sementara waktu.
- 3) Perjalanan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu.
- 4) Ada organisasi atau orang yang mengatur perjalanan tersebut.
- 5) Terdapat unsur-unsur produk wisata.

³⁵ *Ibid*, hal. 22.

³⁶ M. A. Desky, *Manajemen Perjalanan Wisata*, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 1991), hal. 9

- 6) Ada tujuan yang ingin dicapai dari perjalanan wisata tersebut.
- 7) Biaya perjalanan diperoleh dari negara asal.
- 8) Dilakukan dengan santai.

c. Tujuan Pariwisata

Menentukan tujuan adalah langkah awal dari perencanaan agar ketika kegiatan dilaksanakan bisa sesuai dengan apa yang diinginkan. Seseorang dalam melakukan perjalanan pasti memiliki tujuan yang diinginkan. Ada beberapa tujuan pariwisata, antara lain³⁷:

- 1) Keinginan bersantai
- 2) Keinginan mencari suasana lain
- 3) Memenuhi rasa ingin tahu
- 4) Keinginan berpetualang
- 5) Keinginan mencari kepuasan

³⁷ *Ibid*, hlm. 8.

d. Jenis-Jenis Pariwisata

Menurut Pendit (1994), pariwisata dapat dibedakan menurut motif wisatawan untuk mengunjungi suatu tempat. Jenis-jenis pariwisata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wisata Budaya

Yaitu perjalanan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperluas pandangan hidup seseorang dengan jalan mengadakan kunjungan atau peninjauan ke tempat lain atau ke luar negeri untuk mengetahui keadaan rakyat disuatu wilayah, mengetahui kebiasaan atau adat istiadat, cara hidup, serta mempelajari budaya dan keseniannya. Seiring perjalanan serupa ini disatukan dengan kesempatan-kesempatan mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan budaya, seperti eksposisi seni (seni tari, seni drama, seni music, dan seni suara) atau kegiatan yang bermotif kesejahteraan dan sebagainya.

2. Wisata Maritim atau Bahari

Jenis wisata ini banyak dikaitkan dengan kegiatan olahraga di air, lebih-lebih di danau, pantai, teluk, atau laut seperti memancing, berlayar, menyelam sambil melakukan pemotretan, kompotesi berselancar, balapan mendayung, melihat-lihat taman laut dengan pemandangan indah dibawah permukaan air serta berbagai rekreasi perairan

yang banyak dilakukan di daerah-daerah atau negara-negara maritime, laut Karibia, Hawaii, Tahiti, Fiji dan sebagainya.

3. Wisata Cagar Alam

Untuk jenis wisata ini biasanya banyak diselenggarakan oleh agen atau biro perjalanan yang mengkhususkan usaha-usaha dengan jalan mengatur wisata ke tempat atau daerah cagar alam, taman lindung, hutan daerah pegunungan dan sebagainya yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang.

4. Wisata Mice

Menurut Pendit (1999:25), Mice diartikan sebagai wisata konvensi, dengan batasan berupa usaha jasa konvensi, perjalanan insentif, dan pameran merupakan usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan lain sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Menurut Kesrul (2004:3), Mice diartikan sebagai suatu kegiatan kepariwisataan yang aktivitasnya merupakan perpaduan antara *leisure* dan *business*. Biasanya melibatkan sekelompok orang secara bersama-sama, rangkaian kegiatan dalam bentuk *meetings, incentive, travels, conventions, congresses, conference, dan exhibition*.

5. Wisata Agro

Agrowisata adalah tuntutan akan pariwisata yang pro lingkungan, go green, dan bertanggung jawab. Sementara manfaat agrowisata bagi wisatawan adalah mendidik wisatawan untuk memahami kehidupan nyata tentang pertanian dan memberikan pemahaman kepada wisatawan bahwa kehidupan bertani adalah pekerjaan yang amat mulia karena kehidupan manusia lainnya sangat tergantung pada pertanian. Keuntungan lainnya adalah mereka dapat menikmati alam yang sehat dan alamiah bebas dari polusi kota, mendapatkan produk pertanian yang benar-benar segar dan bahkan organic atau *green product*. Selain memberikan pengalaman yang unik, agrowisata juga relative murah jika dibandingkan dengan wisata lainnya.

6. Wisata Buru

Jenis ini banyak dilakukan di negeri-negeri yang memang memiliki daerah atau hutan tempat berburu yang dibenarkan oleh pemerintah dan digalakan oleh berbagai agen atau biro perjalanan. Wisata buru ini diatur dalam bentuk safari buru ke daerah atau hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah negara yang bersangkutan, seperti halnya negara di Afrika untuk berburu gajah, ziraf, singa dan sebagainya.

7. Wisata Ziarah

Jenis wisata ini sedikit banyak dikaitkan dengan agama, sejarah, adat istiadat dan kepercayaan umat atau kelompok dalam masyarakat. Wisata ini banyak dilakukan oleh perorangan atau rombongan ke tempat-tempat suci seperti makam-makam orang besar atau pemimpin yang diagungkan; ke bukit atau gunung yang dianggap keramat; tempat pemakaman tokoh atau pemimpin sebagai manusia ajaib penuh legenda. Wisata ini banyak dihubungkan dengan niat atau hasrat sang wisatawan untuk memperoleh restu, kekuatan batin, keteguhan iman dan tidak jarang pula untuk tujuan memperoleh berkah dan kekayaan melimpah.³⁸

e. Industri Akomodasi dan Kuliner Pariwisata

Kebutuhan akan sarana akomodasi bagi para wisatawan sangat dirasakan manfaat dan pentingnya suatu hotel. Hotel berasal dari Bahasa latin, yakni "*hospes*" yang mempunyai pengertian untuk menunjukkan orang asing yang menginap di rumah seseorang kemudian berkembangnya menjadi kata "hotel" yang dinyatakan sebagai rumah penginapan.

³⁸ I Gusti Bagus Rai Utama, Pemasaran Pariwisata.....hal. 145.

Menurut Gaffar (2007) hotel adalah sejenis akomodasi yang menyediakan fasilitas dan pelayanan penginapan, makan, dan minuman, serta jasa lainnya untuk umum yang tinggi untuk sementara dan dikelola secara professional. Menurut Rumekso (2001) hotel adalah bangunan yang menyediakan kamar untuk tempat menginap para tamu, makanan dan minuman, serta fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Nomor: PM.106/PW.006/MPEK/2011/2011, tentang sistem Sistem Manajemen Pengamana Hotel menyatakan bahwa hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan dan minuman, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.³⁹ Dapat disimpulkan bahwa hotel adalah suatu usaha yang bergerak dibidang akomodasi yang dikelola secara professional guna menghasilkan keuntungan dengan menyediakan pelayanan penginapan, makanan, minuman, dan fasilitas lainnya.

³⁹ I Gusti Bagus Rai Utama, Pemasaran Pariwisata..... hal. 163

f. Devinisi Wisatawan

Pengertian dari wisatawan menurut F.W. Ogilvie yaitu semua orang meninggalkan rumah kediaman mereka untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan sementara mereka bepergian mereka mengeluarkan uang di tempat yang mereka kunjungi tanpa dengan maksud mencari nafkah ditempat tersebut.

Batasan ini diberi variasi lagi oleh A.J. Norwal yang menyatakan seorang wisatawan adalah seseorang yang memasuki wilayah asing dengan maksud dan tujuan apapun asalkan bukan untuk tinggal permanen atau untuk usaha-usaha yang teratur melintasi perbatasan, dan yang mengeluarkan uangnya di negeri yang dikunjungi, yang mana diperolehnya bukan di negeri tersebut melainkan dinegri lain.⁴⁰

Seperti kita ketahui, banyak orang asing yang datang berkunjung ke suatu negara. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua orang asing yang datang dapat dikategorikan sebagai wisatawan. Prof Salah Wahab dalam bukunya *Tourism Managemen (Chapter 3 tentang Guidelines for Measuring Tourist Traffic)* mengelompokkan orang asing yang datang pada pada suatu negara atas 4 kelompok penting, yaitu: imigran

⁴⁰ Pendit, Nyoman S. *Ilmu pariwisata: sebuah pengantar perdana*, (Jakarta: PT. pradnya paramita, 2002), hal 32

(*immigrant*), pengunjung (*visitors*), penduduk (*resident*), dan staf atau anggota siploamatik asing dan tenaga militer.⁴¹

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan diatas maka ciri-ciri seseorang itu dapat disebut sebagai wisatawan yaitu:

1. Perjalanan itu dilakukan lebih dari 24 jam;
2. Perjalanan hanya untuk sementara waktu;
3. Orang yang melukukan tidak mencari nafkah ditempat atau di Negara yang dikunjunginya.⁴²

Selain itu disebut wisatawan juga dapat dilihat dari beberapa makna yaitu:

1. Orang yang mekakukan perjalanan dengan jarak tempuh minimal 25 mil;
2. Orang yang tertarik dan termotivasi untuk mendapatkan kesempatan pengalaman dari *core* produk dan mereknya;
3. Orang yang ingin memperoleh sesuatu dari suatu destinasi, image dan popularitasnya (bobot nilai dari sebuah destinasi), strategis untuk memenuhi kebutuhan wisatawan;
4. Orang yang membelanjakan uang dan waktu luangnya, terutama untuk mengonsumsi situasi destinasi, di mana dia berada (*stay*) untuk menikmati keindahan destinasi;
5. Wisatawan adalah mereka yang menghendaki keramahan masyarakat lokal dalam menerima wisatawan baik asing

⁴¹ Oka A. Yoeti, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Cetakan ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), hal. 281.

⁴² Oka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Bandung: Angkasa, 1982), hal. 130.

maupun domestic, wisatawan menjadi bagian dari masyarakat lokal.⁴³

g. Dampak Ekonomi Pariwisata

Cohen (1984) mengemukakan bahwa positif dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi delapan kelompok besar, yaitu:

1. Dampak terhadap penerimaan devisa
2. Dampak terhadap pendapatan masyarakat
3. Dampak terhadap kesempatan kerja
4. Dampak terhadap harga-harga
5. Dampak terhadap distribusi manfaat/keuntungan
6. Dampak terhadap kepemilikan dan *control*
7. Dampak terhadap pembangunan pada umumnya, dan
8. Dampak terhadap pendapatan pemerintah.

Sedangkan dampak negatifnya adalah sebagai berikut:

1. Ketergantungan terlalu besar pada pariwisata
2. Meningkatkan angka inflasi dan meroketnya harga tanah
3. Meningkatnya kecenderungan untuk mengimpor bahan-bahan yang diperlukan dalam pariwisata
4. Sifat pariwisata yang hanya musiman

⁴³ Ali Hasan, *Tourism Marketing*, (Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service), 2015), hal. 4.

5. Timbulnya biaya-biaya tambahan lain bagi perekonomian setempat.⁴⁴

h. Pariwisata Menurut Ekonomi Islam

Pariwisata dalam Islam atau syariah adalah safar untuk merenungi keindahan ciptaan Allah Ta'ala, menikmati indahnya alam sebagai pendorong jiwa manusia untuk menguatkan keimanan terhadap keesaan Allah dan memotivasi menunaikan kewajiban hidup. Dalam konsep Islam perjalanan manusia dengan maksud dan keperluan tertentu dipermukaan bumi (berpariwisata), harus diiringi dengan keharusan untuk memperhatikan dan mengambil pelajaran dari hasil pengamatan dalam perjalanannya.

Dalam pariwisata, Islam menggaris bawahi niat atau tujuan sebagai pembeda boleh atau tidaknya pariwisata tersebut. Niat atau tujuan yang amar ma'ruf nahi munkar dalam perjalanan pariwisata menjadikan berlakunya keringanan-keringanan yang diberikan Allah SWT kepada musafir. Tujuan dari ekonomi Islam adalah tujuan pengembangan, berproduksi dan menambah pemasukan Negara, syari' terkait dengan kebebasan pemutaran harta, keadilan dalam perputaran harta. Dan tujuan utamanya adalah kebahagiaan didunia dan

⁴⁴ I Gede Pitana dan I Ketut Surya Diarta, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, (Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2009), hal. 191.

diakhirat. Dari tujuan diatas, maka perkembangan pariwisata dalam Islam haruslah sejalan dan sesuai dengan syariat Islam yang dapat membuat semua golongan manusia tidak peduli kaya atau miskin menjadi sejahtera bukan hanya didunia tapi juga diakhirat.⁴⁵

Pariwisata Syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah SWT.

Saat ini, pariwisata yang berbasis syariah atau islami telah menjadi sebuah tren baru dalam perkembangan pariwisata di berbagai belahan dunia. Esensi dari pariwisata syariah merujuk pada usaha menyingkirkan segala hal yang dapat membahayakan bagi manusia dan mendekatkan manusia kepada hal yang akan membawa kebermanfaatn bagi dirinya maupun lingkungan.

Terdapat beberapa faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengolahannya untuk semua wisatawan yang dalam hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri yaitu:

⁴⁵ M. Hanbali, *Tujuan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Diatlika, 2013), hal 2.

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
2. Pemandu dan staff harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip- prinsip Islam.
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam.
4. Rumah makan harus mengikuti standar internasional pelayanan halal.
5. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi.
6. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan.
7. Tempat wisata tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Kemudian terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah yakni:

1. Lokasi, yakni Penerapan sistem Islami di area pariwisata, lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan oleh kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
2. Transportasi, yakni Penerapan sistem, seperti pemisah tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan

mahramnya sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan.

3. Konsumsi, yakni Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, maksud segi kehalalan disini yakni baik dari sifatnya, perolehannya, maupun pengolahannya. Selain itu suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.
4. Hotel, yakni Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan dengan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan disini tidak hanya dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu, dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.⁴⁶

Dewasa ini, kebutuhan wisatawan terhadap pariwisata syariah tidak lagi sebatas ziarah ke makam maupun wisata religi lainnya. Pariwisata syariah telah merambah ke berbagai sektor jasa, perhotelan, dan restoran dimana sektor-sektor tersebut kini banyak diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Contohnya restoran yang menjual makanan halal (tidak

⁴⁶ Rini Haryanti, *Analisis Sektor Pertanian dan Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Lampung Barat Dalam Perspektif Ekonomi Islam tahun 2010-2017*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

mengandung olahan babi dan anjing) dan bisnis perhotelan yang menerapkan prinsip syariah (tidak menyediakan minuman berakohol; hanya menyediakan makanan dan minuman yang halal; dan menyediakan berbagai fasilitas penunjang untuk ibadah, seperti al-qur'an serta petunjuk arah kiblat di setiap kamar).⁴⁷

B. PENELITIAN TERDAHULU

Berdasarkan penelusuran peneliti mengenai koleksi skripsi dan jurnal yang telah ada, penulis tidak menemukan judul penelitian yang sama dengan judul “Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2015-2018”, sebagaimana dijadikan riset oleh penulis. Namun penulis menemukan skripsi yang masih berkaitan dengan judul penelitian ini, yaitu:

Isnaini dengan periode penelitian 15 tahun dari tahun 1998-2012 dimana variabel yang mewakilkan sektor pariwisata diantaranya jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan per kapita ternyata terdapat satu variabel yang negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah yaitu variabel pendapatan perkapita. Dari hasil output regresi dengan uji F-statistik menyimpulkan bahwa secara bersama-sama

⁴⁷ Unggul Prayadi, *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2016), hal. 1.

variabel independen sektor pariwisata tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap variabel pendapatan asli daerah Kabupaten Tulungagung. Nilai persentase variabel sektor pariwisata Kabupaten Tulungagung tersebut cukup besar dalam memberikan sumbangan kepada variabel pendapatan asli daerah yang dapat diketahui melalui persentase koefisien determinasinya (R Square). Berdasarkan hasil analisis secara persial masing-masing individu variabel bebasnya maka dapat diketahui bahwa variabel yang memiliki pengaruh signifikan paling besar terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah adalah variabel jumlah objek wisata. Sehingga variabel ini dapat menjadi faktor yang dapat diandalkan jika dikembangkan dengan lebih optimal⁴⁸.

Insak dengan variabel penelitiannya adalah Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata, Pendapatan Asli Daerah dengan menggunakan alat analisis regresi sederhana. Hipotesis yang diajukan menyatakan bahwa persentase pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Kutai Kartanegara dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 semakin meningkat diterima. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel. Adapun besaran persentase pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap

⁴⁸ Arif Wahyu Isnaini, *Studi Potensi Ekonomi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung*, (Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, 2014).

peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 adalah sebesar 24,3% dan signifikan⁴⁹.

Qomariyyah dengan variabel penelitiannya adalah Pendapatan Asli Daerah, Retribusi, dan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa Kontribusi sektor Retribusi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan, sedangkan Kontribusi sektor pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Pacitan⁵⁰.

Prasetyo dengan Variabelnya adalah pendapatan pariwisata, jumlah wisatawan, arus kendaraan, jumlah kamar dan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabelnya adalah berdasarkan hasil analisis, variabel jumlah wisatawan dan kamar hotel berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pariwisata, variabel arus kendaraan secara nyata tidak berpengaruh terhadap pendapatan pariwisata pada taraf signifikansi 5% dan dari uji ekonometrik dapat disimpulkan tidak terjadi gangguan asumsi klasik, seperti multikolinieritas, heteroskedastisitas, maupun autokorelasi. Perkembangan pariwisata memiliki kecenderungan meningkat karena tingkat nilai b nya memiliki tanda positif dengan

⁴⁹ Novia Robi'atul Insak, *Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapata Asli Daereh (PAD) pada Kabupaten Kutai Kartanegara*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 2013)

⁵⁰ Wakhidah Nur Qomariyyah, *Kontribusi Pendapatan Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Dearah Kabupaten Pacitan 2014 – 2016*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

nilai probabilitas kurang dari 0,05. Kontribusi pendapatan pariwisata terhadap pendapatan asli daerah bertanda positif tetapi tidak signifikan karena nilai b yang di dapat lebih besar dari 0,05⁵¹.

Dita dengan penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran pemerintah dan PDRB mempengaruhi pendapatan asli daerah di makasar. Variabel bebas terdiri dari Pengeluaran Pemerintah dan PDRB sedangkan variabel terikatnya yaitu Pendapatan Asli Daerah. Metode analisisnya menggunakan analisis regresi berganda 2 SLS. Hasil dari penelitian ini yaitu Pengeluaran Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD melalui PDRB dan berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sedangkan PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)⁵².

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut meskipun sedikit banyaknya ada kesamaan dengan penelitian sebelumnya, namun pendekatan penelitian yang disusun saat ini memiliki perbedaan. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada persoalan tentang pengaruh sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek tahun 2015-2018. Penelitian yang peneliti

⁵¹ Udhi Sony Prasetyo, *Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Karanganyar*, (Tesis: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sebelas Maret, 2011)

⁵² Indra Rindu Dita, *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Makassar Tahun 1999-2009*, (Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makasar, 2011).

lakukan lebih difokuskan kepada sektor pariwisata yang berada di kabupaten Trenggalek dan dengan variabel bebasnya adalah jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan Pendapatan Pariwisata. Variabel terikatnya adalah Pendapatan Asli Daerah. Dari pembahasan penelitian diatas, jelas memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan disusun saat ini.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁵³ Menurut Muhammad kerangka berisi gambaran pola hubungan antar variabel atau kerangka konsep yang digunakan untuk menjawab masalah yang diteliti, disusun berdasarkan kajian teoritik yang telah dilakukan dan didukung oleh hasil penelitian terdahulu.⁵⁴ Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut. Kerangka berfikir berguna untuk mempermudah didalam memahami persoalan yang sedang diteliti serta mengarahkan penelitian pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi.

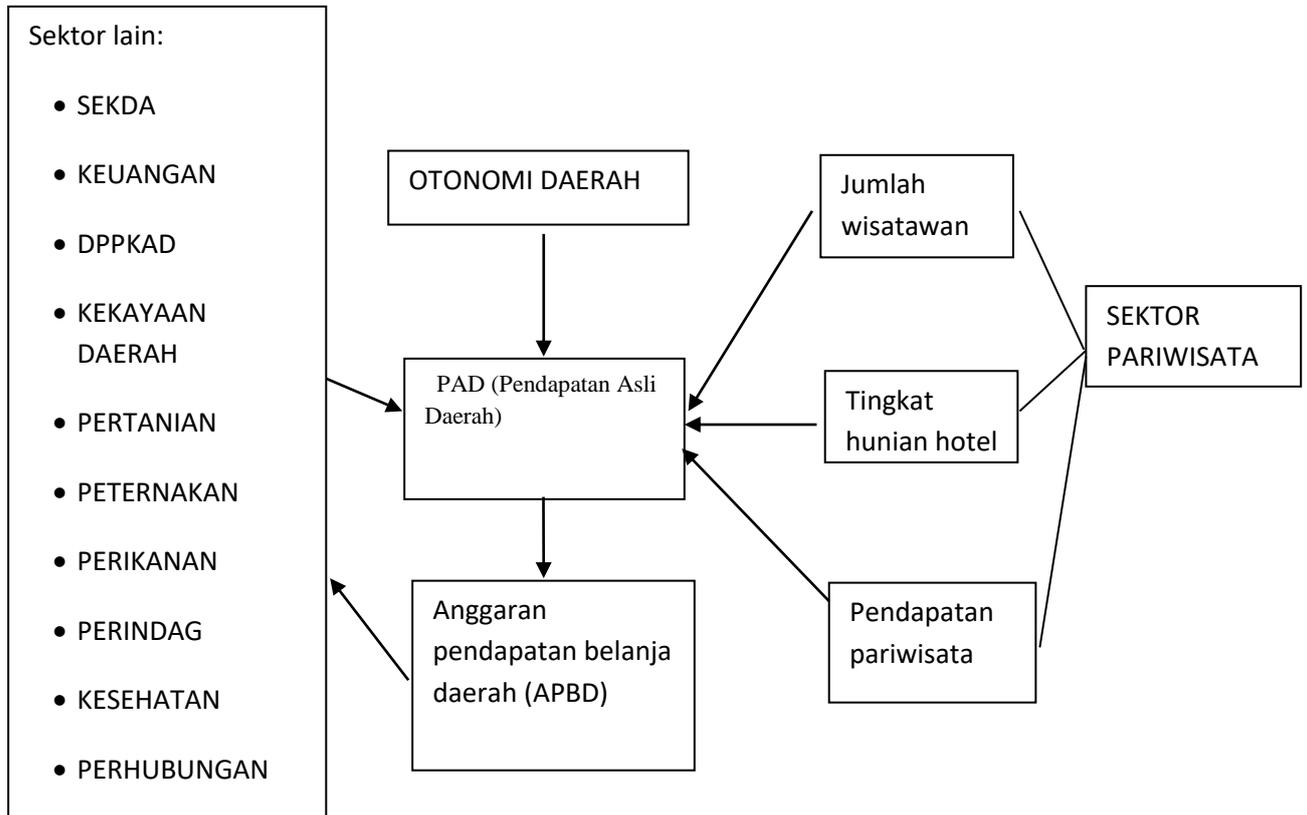
⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi* cetakan 7, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 93.

⁵⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 256.

Sektor pariwisata sebagai industri yang semakin berkembang dengan dibuktikan semakin banyaknya jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel, dan pendapatan pariwisata. Sektor pariwisata dinilai dapat memberikan kontribusi terhadap kehidupan ekonomi, sosial dan budaya bangsa seperti memberikan kesempatan kerja bagi orang-orang terampil di bidang pariwisata dan pendapatan negara dari sektor pajak dan devisa semakin bertambah. Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah dari seluruh unit ekonomi dalam satu daerah.

Bermula pada sektor pariwisata yang meliputi jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan pariwisata yang berpengaruh pada Pendapatan Asli Daerah yang dibawah naungannya otonomi daerah. Sehingga Pendapatan Asli Daerah juga berimplikasi pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang mencakup beberapa sektor lain, yaitu: SEKDA, Keuangan, DPPKAD, Kekayaan Daerah, Pertanian, Perikanan, Peternakan, PERINDAG, Kesehatan, Perhubungan, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar kerangka pemikiran berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



D. Hipotesis Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, maka penulis menuliskan diskripsinya sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah wisatawan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan dari tingkat hunian hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.

3. Terdapat pengaruh yang signifikan dari pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.
4. Terdapat pengaruh yang signifikan dari jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel dan pendapatan pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Trenggalek.